

Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD

Updated Survei Nasional:
21 – 28 Mei 2021

Latar Belakang

- Sampai sekarang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dan akhir-akhir ini muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya untuk mengamandemen kembali UUD 1945.
- Aspirasi untuk amandemen yang belakangan ini cukup sering muncul terkait dengan unsur-unsur pokok dalam presidensialisme atau sistem pemerintahan presidensial.
- Aspirasi yang muncul terkait dengan perlunya memberikan wewenang lebih besar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- MPR diharapkan berwenang memilih Presiden.
- MPR diharapkan berwenang merumuskan dan menetapkan Garis-garis Haluan Negara (GBHN) yang atas dasar itu presiden harus bekerja.

Latar Belakang

- Aspirasi itu dapat berimplikasi menghapus sistem presidensial (presidensialisme) yang dianut dalam konstitusi sekarang. Mengapa?
- Karena unsur–unsur dasar presidensialisme adalah:
- 1) Kekuasaan bersifat ganda: eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR dan DPD) sama–sama independen dan sama–sama dipilih rakyat langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat lewat pemilihan umum. Keduanya tidak bisa saling membubarkan.
- 2) Presiden, seperti halnya DPR/DPD berkuasa untuk periode yang fixed (tetap) sehingga tidak bisa diberhentikan di luar mekanisme pemilihan umum kecuali melanggar undang–undang.

Latar Belakang

- 3) Presiden bekerja sesuai dengan program yang dijanjikannya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan umum bukan menurut garis-garis yang ditetapkan MPR (DPR dan DPD).
- Keinginan agar Presiden dipilih oleh MPR (yang terdiri dari DPR dan DPD) membuat presiden bertanggung jawab kepada MPR, dan akibatnya MPR dapat memberhentikan presiden kapan saja dipandang perlu oleh kekuatan mayoritas di MPR.
- Bila presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR maka ada tuntutan agar presiden mengikuti GBHN tersebut, dan seperti dalam sistem sebelum menganut presidensialisme, keterikatan presiden pada GBHN dimungkinkan karena presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Latar Belakang

- Di samping itu muncul aspirasi agar amandemen dilakukan terhadap pasal di UUD tentang masa berkuasa presiden yang dibatasi maksimal hanya dua kali menjadi lebih dari dua kali.
- Pembatasan masa kekuasaan presiden ini amanat reformasi karena pengalaman selama ini bahwa tanpa batasan tersebut bangsa Indonesia menghadapi masalah besar, seperti di masa Orde Lama maupun Orde Baru.
- Masa jabatan presiden yang dibatasi hanya 2 periode adalah gejala umum dalam presidensialisme di dunia.

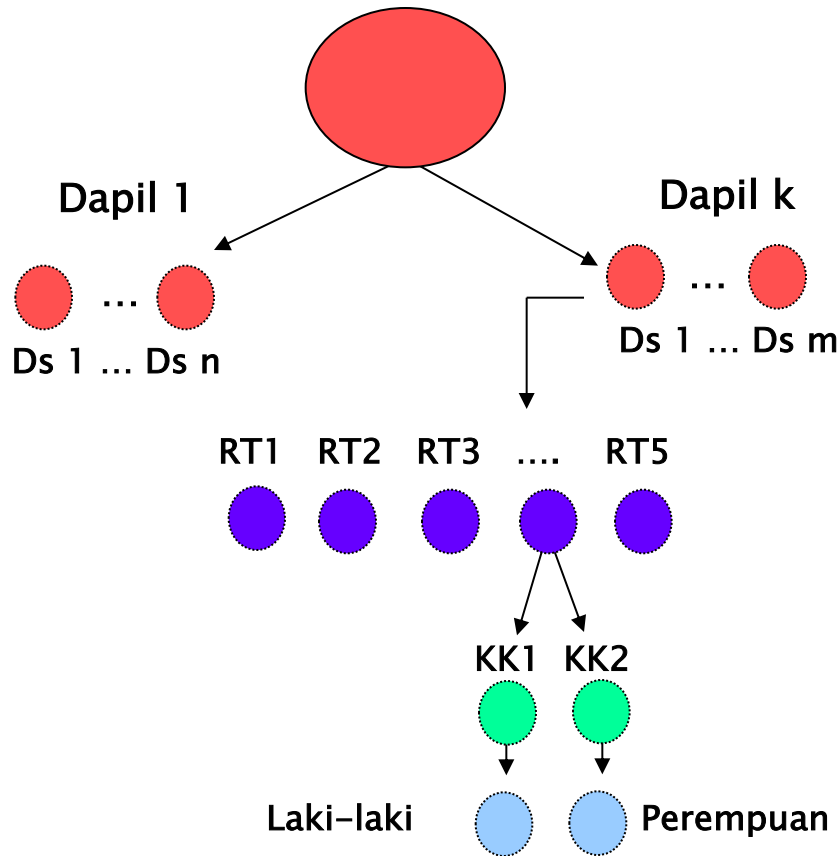
Latar Belakang

- Menurut UUD 1945, DPD tak punya hak legislasi (ikut memutuskan UU), hak bujet (ikut memutuskan APBN), dan hak pengawasan. Aspirasi DPD agar pasal-pasal di UUD terkait itu diamandemen sehingga DPD punya wewenang untuk legislasi, budgeting, dan pengawasan pemerintah seperti halnya DPR.
- Karena berkaitan dengan dasar negara, UUD yang bersifat fundamental, sebaiknya diketahui bagaimana publik bersikap terhadap isu-isu amandemen tersebut.
- Survei opini publik nasional adalah satu cara untuk mengetahui sikap publik tersebut.
- Presentasi ini melaporkan hasil survei nasional tersebut.

Metodologi

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1072 atau 88%. Sebanyak 1072 responden ini yang dianalisis. Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar $\pm 3.05\%$ pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling).
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
- Waktu wawancara lapangan 21 – 28 Mei 2021.

Flow chat penarikan sampel



Populasi desa/kelurahan
tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat
Dapil dipilih secara random dengan jumlah
proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5
RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan
dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random
Satu orang yang punya hak pilih
laki-laki/perempuan

Validasi Sampel

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	50.0	50.0
Perempuan	50.0	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	50.3	50.2
Perkotaan	49.7	49.8
USIA		
<= 20 tahun	10.1	10.3
21-25 tahun	12.5	12.5
26-30 tahun	13.3	13.5
31-35 tahun	11.6	12.0
36-40 tahun	11.6	11.6
41-45 tahun	9.6	9.8
46-50 tahun	8.7	8.6
51-55 tahun	6.5	6.6
56-60 tahun	5.3	5.1
> 60 tahun	10.8	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
AGAMA		
Islam	87.2	87.3
Protestan/Katolik	10.4	9.8
Lainnya	2.3	3.0
ETNIS		
Jawa	40.6	40.2
Sunda	14.5	15.5
Batak	3.7	3.6
Madura	2.8	3.0
Betawi	2.9	2.9
Bugis	2.3	2.7
Minang	2.7	2.7
Lainnya	30.4	29.4

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

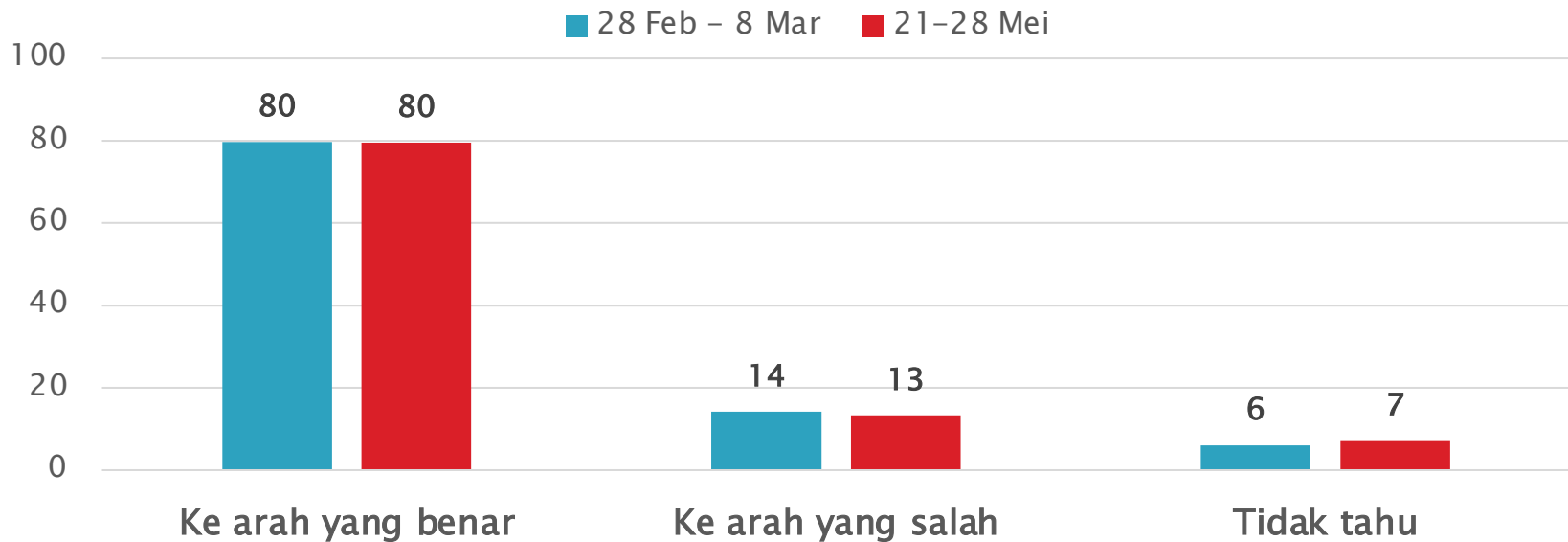
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
Aceh	1.9	1.8
Sumatera Utara	5.6	5.1
Sumatera Barat	1.9	1.9
Riau	1.8	2.0
Jambi	1.2	1.3
Sumatera Selatan	3.2	3.1
Bengkulu	0.8	0.7
Lampung	2.8	3.2
Bangka Belitung	0.8	0.5
Kepulauan Riau	0.9	0.6
DKI Jakarta	4.2	4.1
Jawa Barat	16.0	17.4
Jawa Tengah	15.0	14.6
DI Yogyakarta	1.6	1.4
Jawa Timur	15.1	16.2
Banten	4.0	4.3
Bali	1.9	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NTB	1.9	1.9
NTT	1.9	1.8
Kalimantan Barat	1.2	1.9
Kalimantan Tengah	0.9	0.9
Kalimantan Selatan	1.9	1.5
Kalimantan Timur	1.4	1.3
Kalimantan Utara	0.8	0.2
Sulawesi Utara	0.8	1.0
Sulawesi Tengah	0.9	1.0
Sulawesi Selatan	2.4	3.2
Sulawesi Tenggara	0.8	0.9
Gorontalo	0.7	0.4
Sulawesi Barat	0.9	0.5
Maluku	0.9	0.7
Maluku Utara	0.9	0.4
Papua Barat	0.9	0.4
Papua	1.7	1.9

ARAH PERJALANAN BANGSA

Arah Perjalanan Bangsa

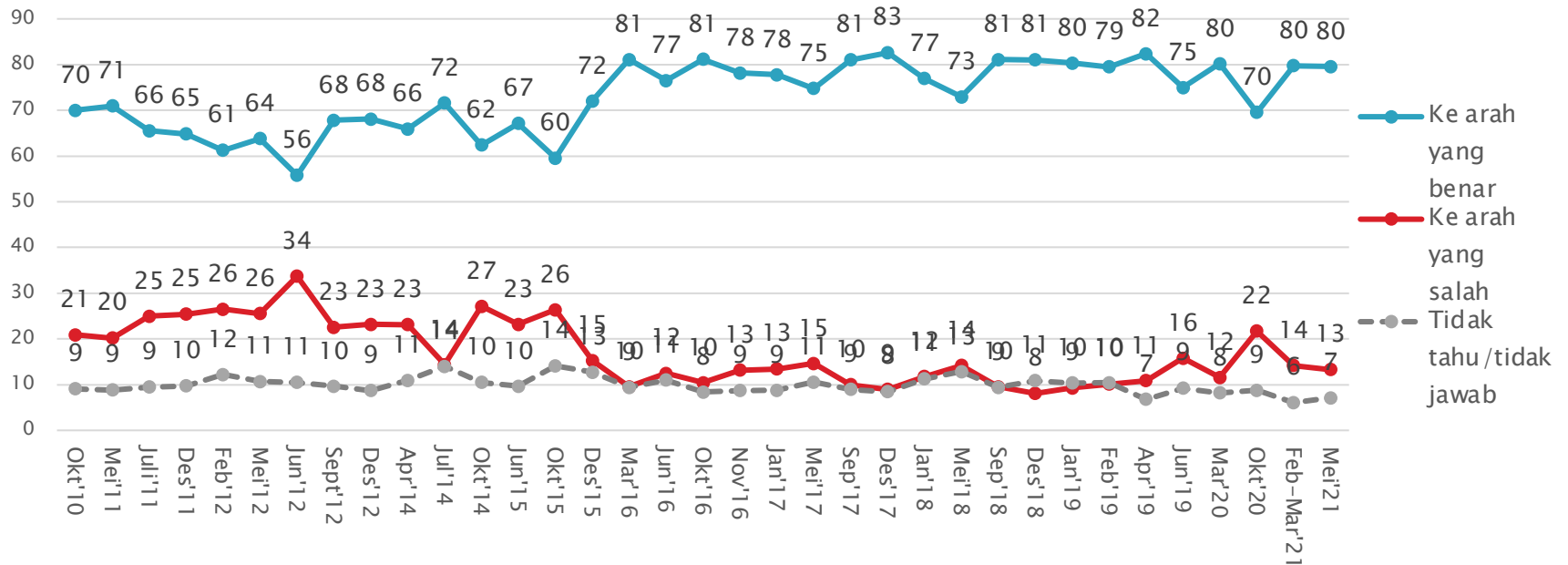
Secara umum bagaimana Ibu/Bapak melihat arah negara kita? Apakah negara kita sekarang sedang bergerak ke arah yang benar atau ke arah yang salah? ... (%)



Ada 80% yang menilai negara Indonesia sekarang sedang bergerak ke arah yang benar, sementara 13% menilai bergerak ke arah yang salah. Dibanding 2-3 bulan sebelumnya tidak berubah.

Arah Perjalanan Bangsa

Bagaimana Ibu/Bapak melihat arah perjalanan negara kita? Apakah negara kita sekarang berjalan menuju ke arah yang benar atau ke arah yang salah? ...(%)



Sentimen positif terhadap arah bangsa dalam survei terakhir (Mei 2021) sekitar 80%, tidak berbeda dengan 2-3 bulan sebelumnya (Feb-Mar 2021), dan lebih positif dibanding kondisi Oktober 2020 lalu yang sempat turun menjadi 70%.

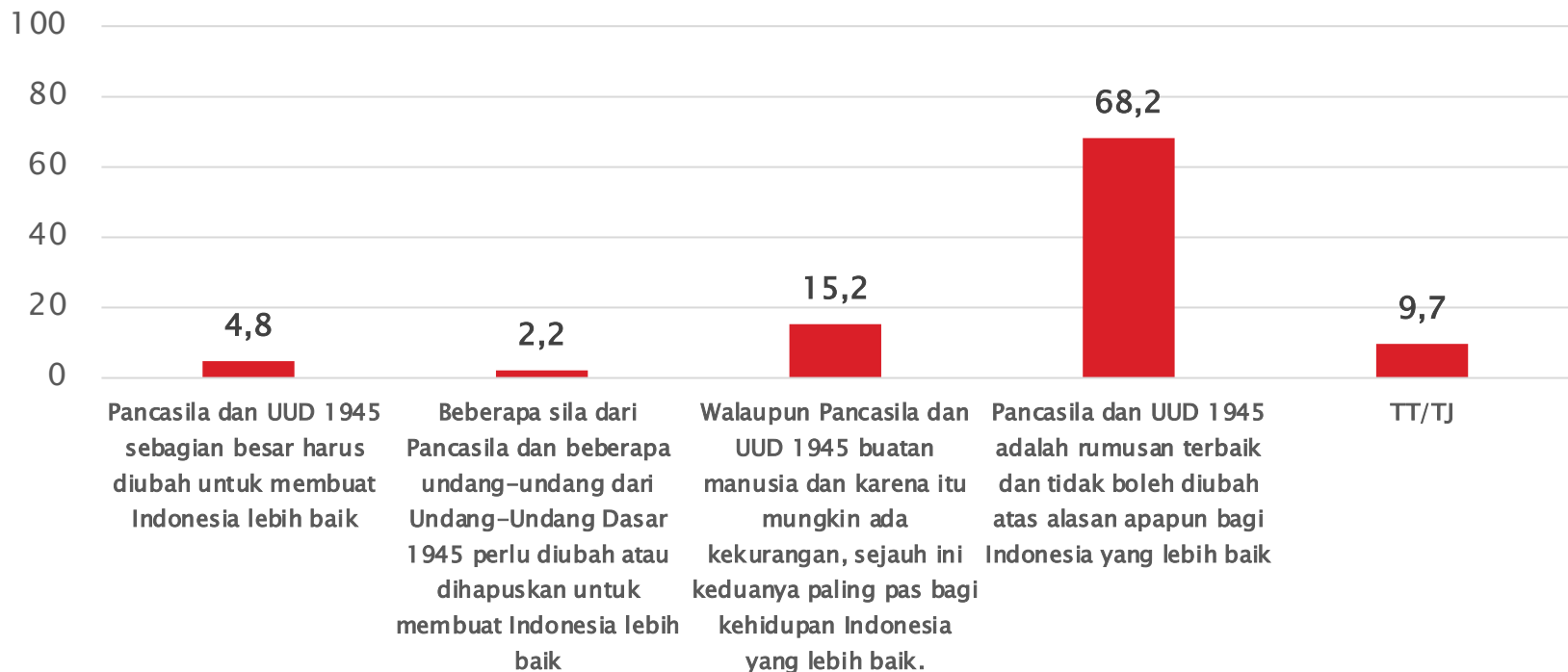
Temuan

- ▶ Evaluasi dasar atas kondisi bangsa harus terkait dengan arah bangsa ini, apakah bangsa ini sedang berjalan menuju arah yang benar atau salah.
- ▶ Apapun yang terjadi, bila warga umumnya menilai bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar, maka keberadaan bangsa ini legitimate, dan ini merupakan modal politik massa yang sangat penting.
- ▶ Secara umum, warga menilai bahwa bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar (80%). Penilaian ini tidak berbeda signifikan sejak 5 tahun lalu.
- ▶ Dalam jangka yang lebih panjang, 21 tahun, penilaian positif ini semakin tinggi.
- ▶ Dalam sentimen publik yang positif dan normal ini muncul aspirasi elite untuk mengubah konstitusi. Publik sendiri bersikap seperti apa?

SIKAP UMUM TENTANG PANCASILA DAN UUD 1945

Pendapat tentang Pancasila dan UUD'45

Ada pendapat berikut tentang Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat mana yang paling Ibu/Bapak setuju? ... (%)



Mayoritas 68.2% warga setuju dengan pendapat “Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik”. Ada 15.2% yang setuju dengan pendapat “Walaupun Pancasila dan UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini keduanya paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik”.

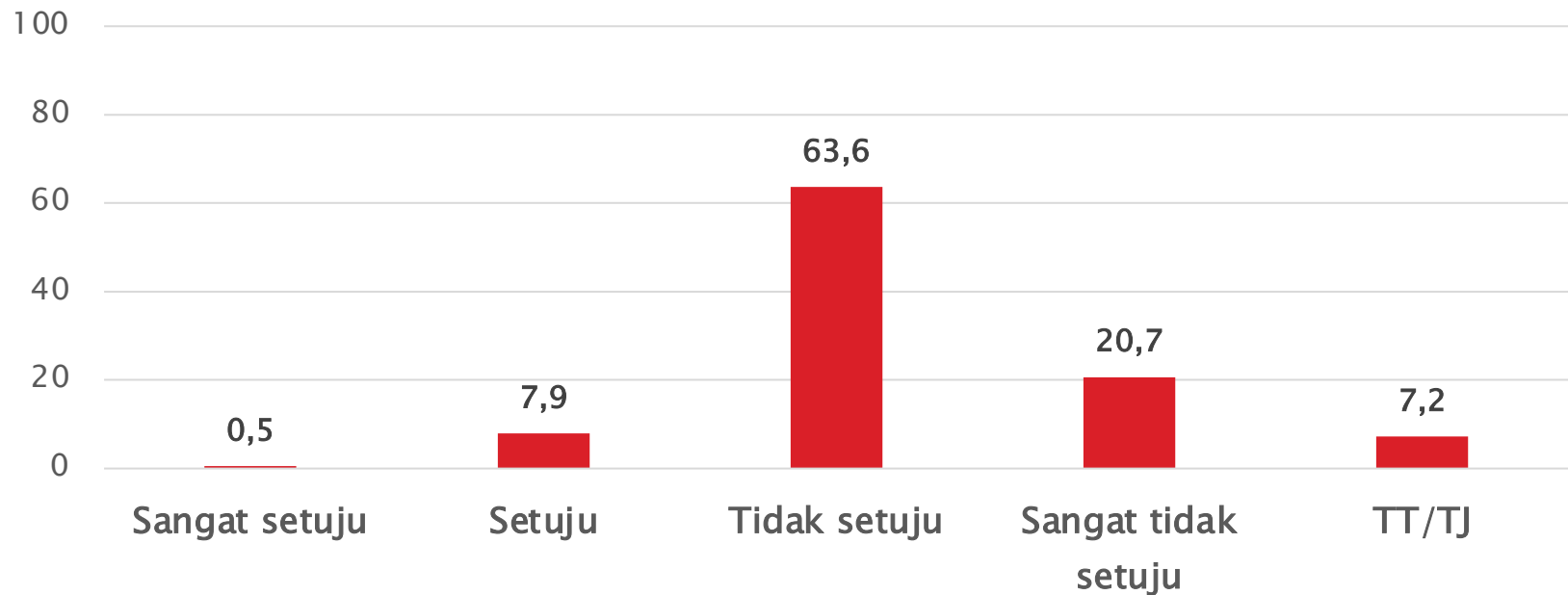
Temuan

- ▶ Secara umum komitmen publik pada Pancasila dan UUD 1945 sangat kuat.
- ▶ Dalam menilai negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mayoritas warga (68.2%) menilai bahwa “Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik”.
- ▶ Ada 15.2% yang berpendapat “walaupun Pancasila dan UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini keduanya paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik”.
- ▶ Hanya 2.2% yang menilai “beberapa sila dari Pancasila dan beberapa undang-undang dari Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah atau dihapuskan untuk membuat Indonesia lebih baik”. Dan hanya 4.8% yang menilai “Pancasila dan UUD 1945 sebagian besar harus diubah untuk membuat Indonesia lebih baik”
- ▶ Yang tidak punya sikap 9.7%.

SISTEM PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN

Setuju atau Tidak: Presiden Tidak Dipilih Langsung tapi Dipilih MPR?

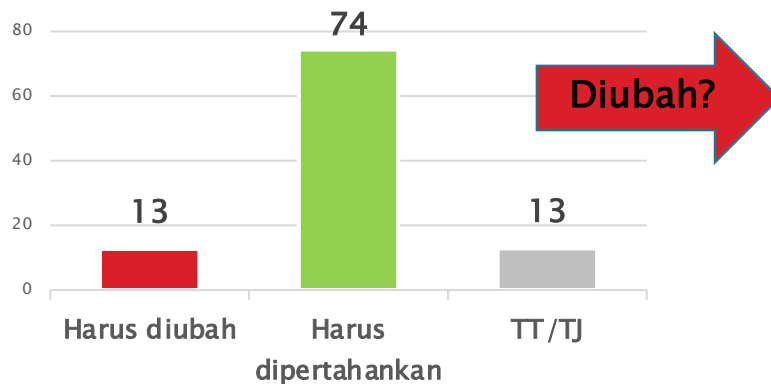
Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan pendapat tersebut? ... (%)



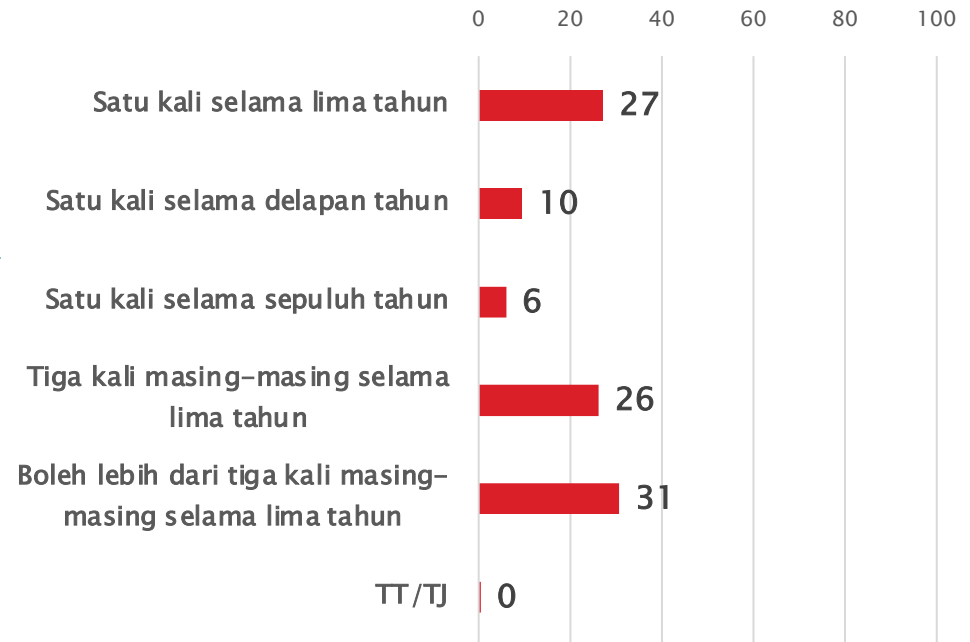
Ada 8.4% warga yang setuju/sangat setuju agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Sementara mayoritas, 84.3% tidak setuju/sangat tidak setuju.

Masa Jabatan Presiden

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya DUA kali, masing-masing selama LIMA tahun. Menurut Ibu/Bapak apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan? ... (%)



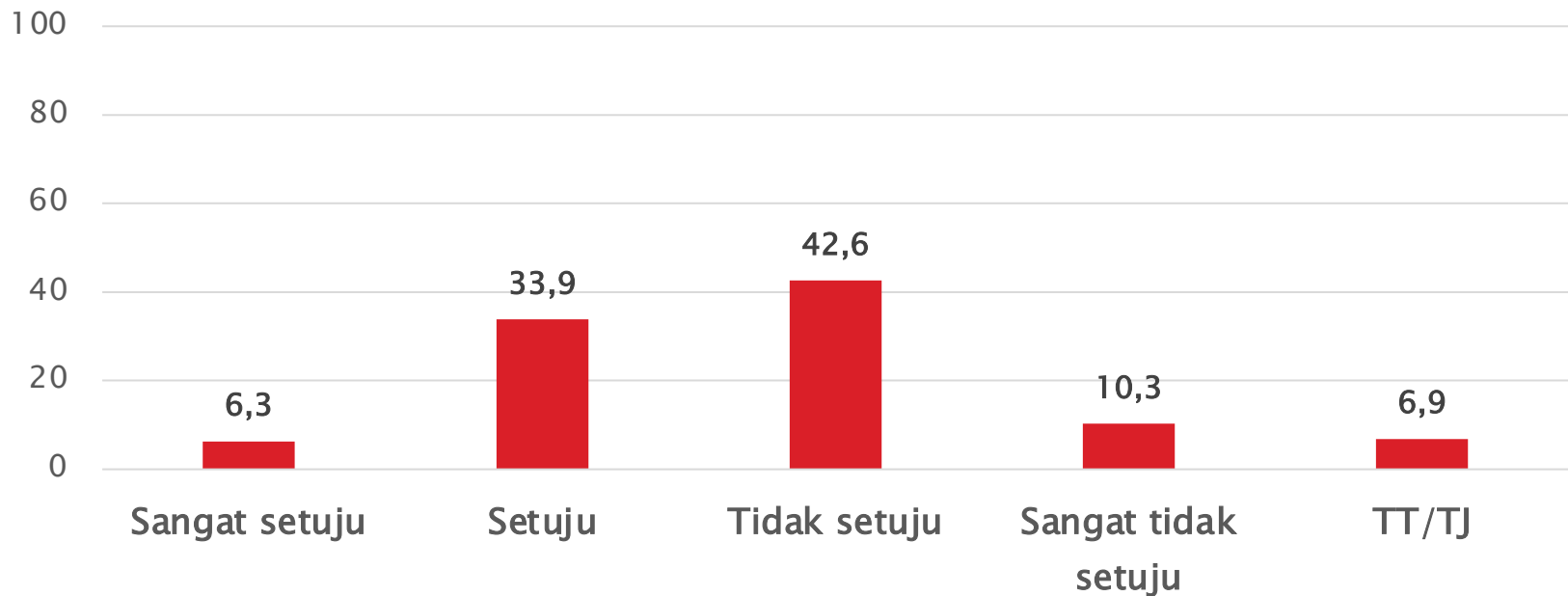
Bila harus diubah, menurut Ibu/Bapak berapa kali sebaiknya masa jabatan presiden? ... (%)



- Ada 13% warga yang menilai ketentuan masa jabatan Presiden maksimal dua kali harus diubah, sementara mayoritas, 74%, menilai harus dipertahankan 2 kali.
- Dari yang menilai harus diubah, ada 43% yang menilai harus diubah menjadi satu kali, sementara 57% menjadi lebih dari dua kali.

Setuju atau Tidak: Jokowi Harus Kembali Menjadi Capres di Pemilihan 2024?

Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti? Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut? ... (%)



Ada 40.2% warga yang setuju/sangat setuju Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Sementara mayoritas, 52.9%, tidak setuju/sangat tidak setuju.

Temuan

- ▶ Publik umumnya setuju bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat (84.3%), bukan oleh MPR.
- ▶ Hanya 8.4% warga yang setuju/sangat setuju agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR.

Temuan

- ▶ Publik juga umumnya menghendaki agar masa jabatan presiden 2 kali dipertahankan (74%). Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%.
- ▶ Umumnya publik tidak setuju presiden Jokowi kembali mejadi calon presiden untuk ketiga kalinya (52.9%). Yang setuju jumlahnya lebih sedikit, 40.2%, dan yang tidak menjawab 6.9%.

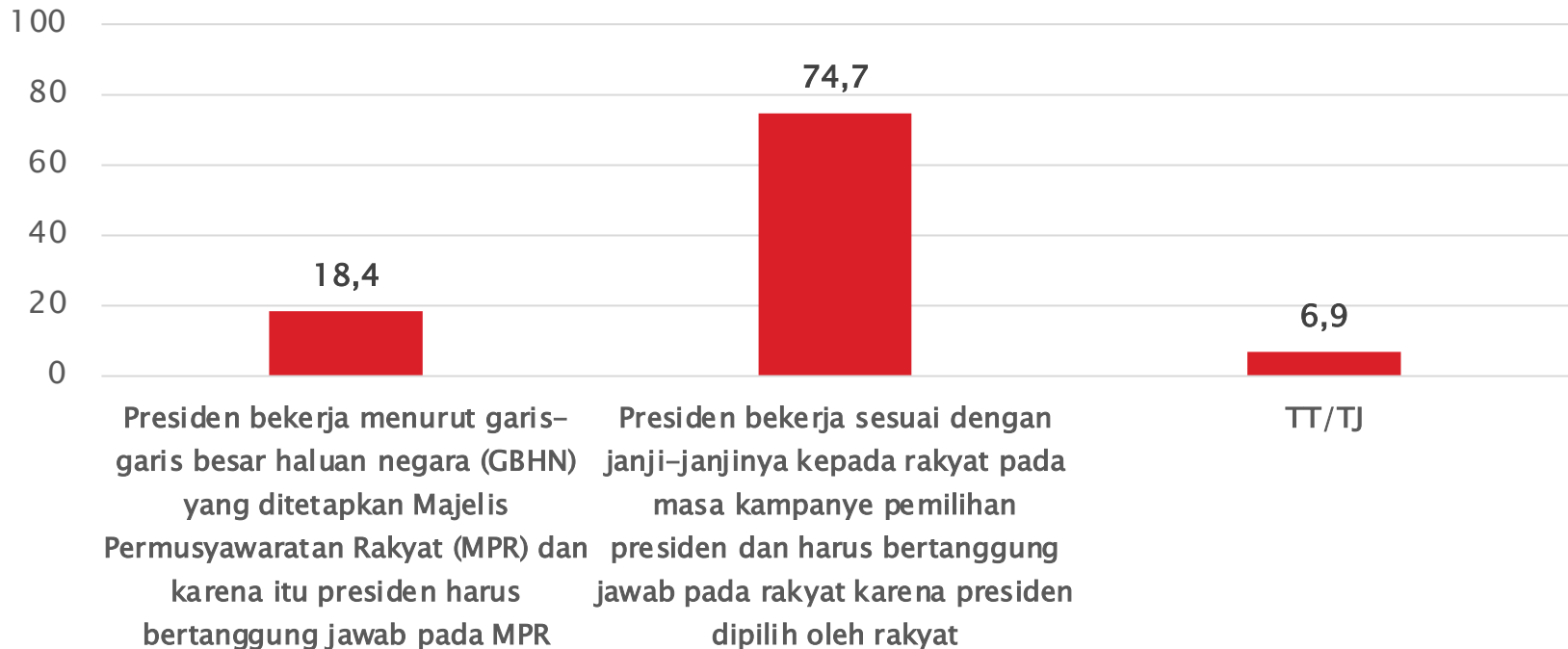
Temuan

- ▶ Pada tingkat dasar, 74% publik ingin presiden 2 periode saja, tapi ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung “2 periode saja” cukup banyak yang goyah sehingga tidak lagi 74% yang menolak Jokowi kembali menjadi calon meskipun yang menolak Jokowi menjadi calon tetap mayoritas (52.9%).
- ▶ Ada efek Jokowi terhadap sikap publik.

Presiden Bekerja Menurut GBHN vs Menurut Janji pada Rakyat di Masa Kampanye

Presiden Bekerja Menurut GBHN atau Sesuai Janjinya pada Masa Kampanye Pilpres?

Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana? ... (%)



Mayoritas warga, 74.7%, lebih setuju pendapat "Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat".

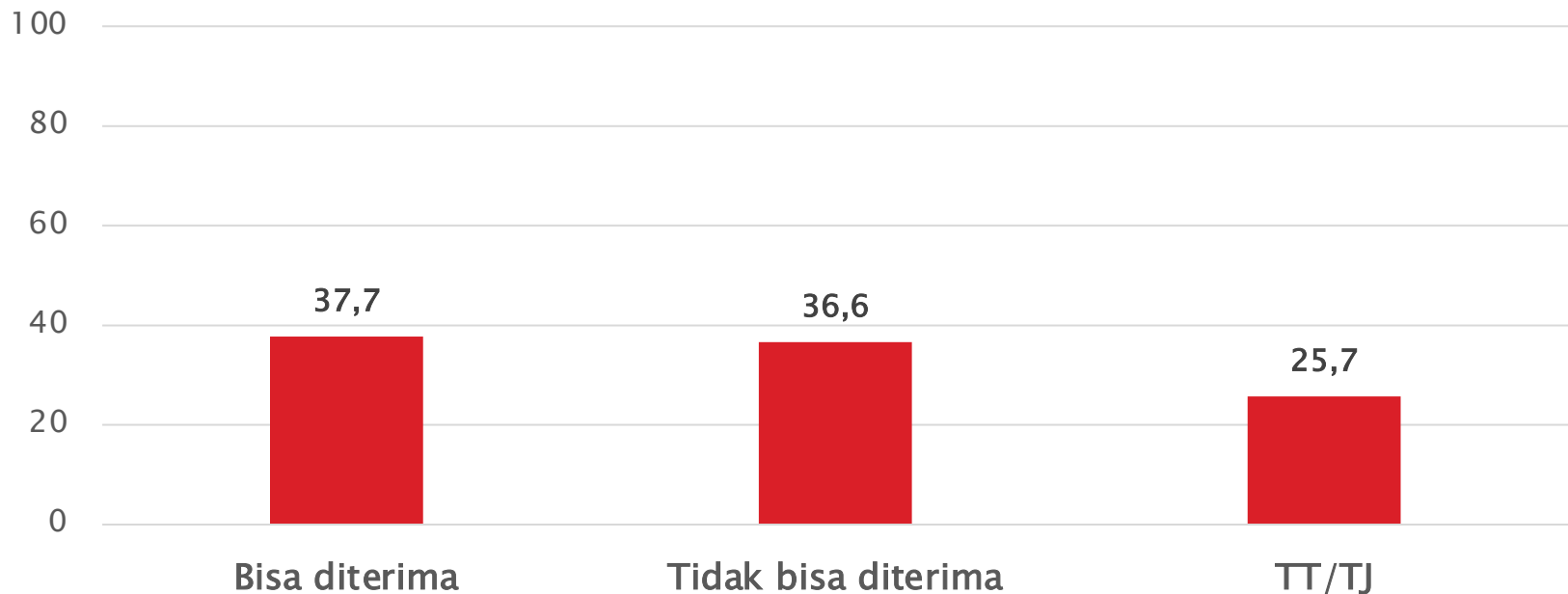
Temuan

- ▶ Mayoritas warga, 74.7%, lebih setuju pendapat “Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat”.
- ▶ Hanya 18.4% yang setuju pendapat “Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR”. Sementara yang tidak punya sikap 6.9%.

SIKAP TERHADAP WEWENANG DPD

Tidak Adanya Hak Anggota DPD Membuat UU Bisa Diterima atau Tidak?

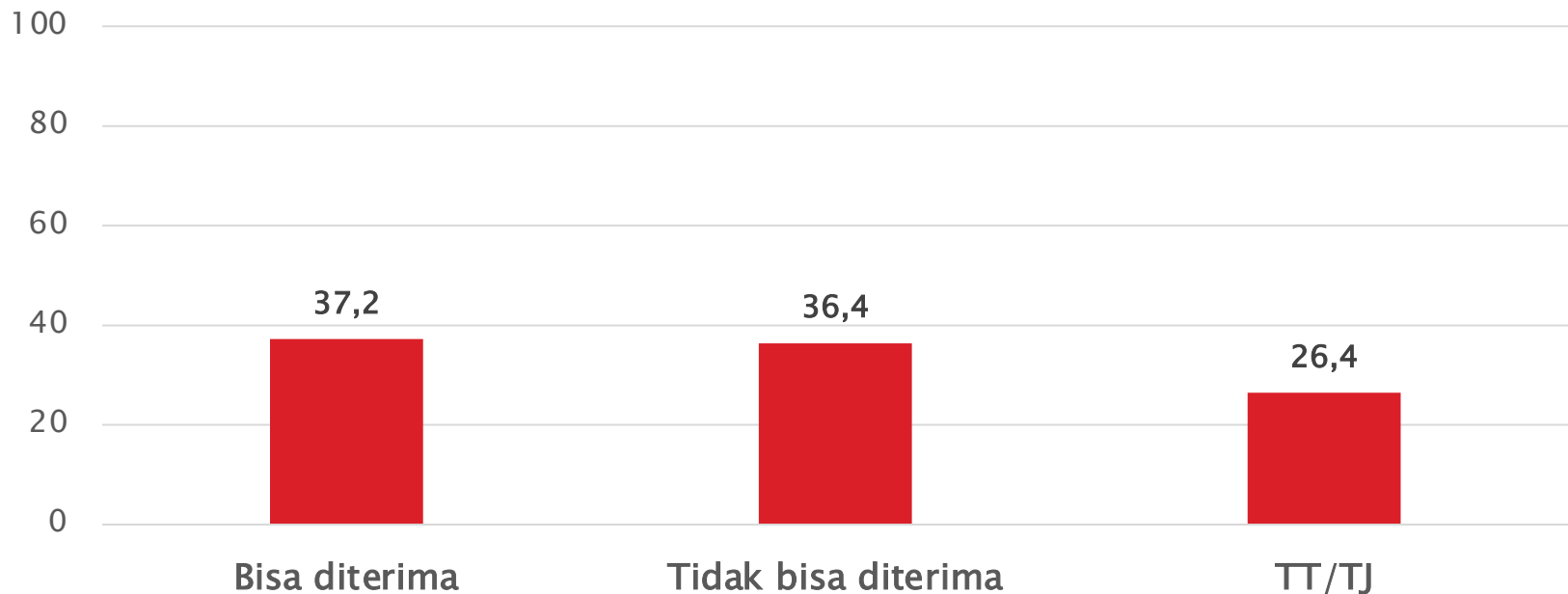
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu). Tapi sekarang mereka tidak punya hak membuat undang-undang seperti anggota DPR. Apakah tidak adanya hak anggota DPD ini bisa diterima atau tidak? ... (%)



Opini terbelah: Ada 37.7% warga yang bisa menerima tidak adanya hak anggota DPD membuat undang-undang seperti anggota DPR. Sementara yang tidak bisa menerima hampir sama besar, 36.6%.

Tidak Adanya Hak Anggota DPD Menetapkan APBN Bisa Diterima atau Tidak?

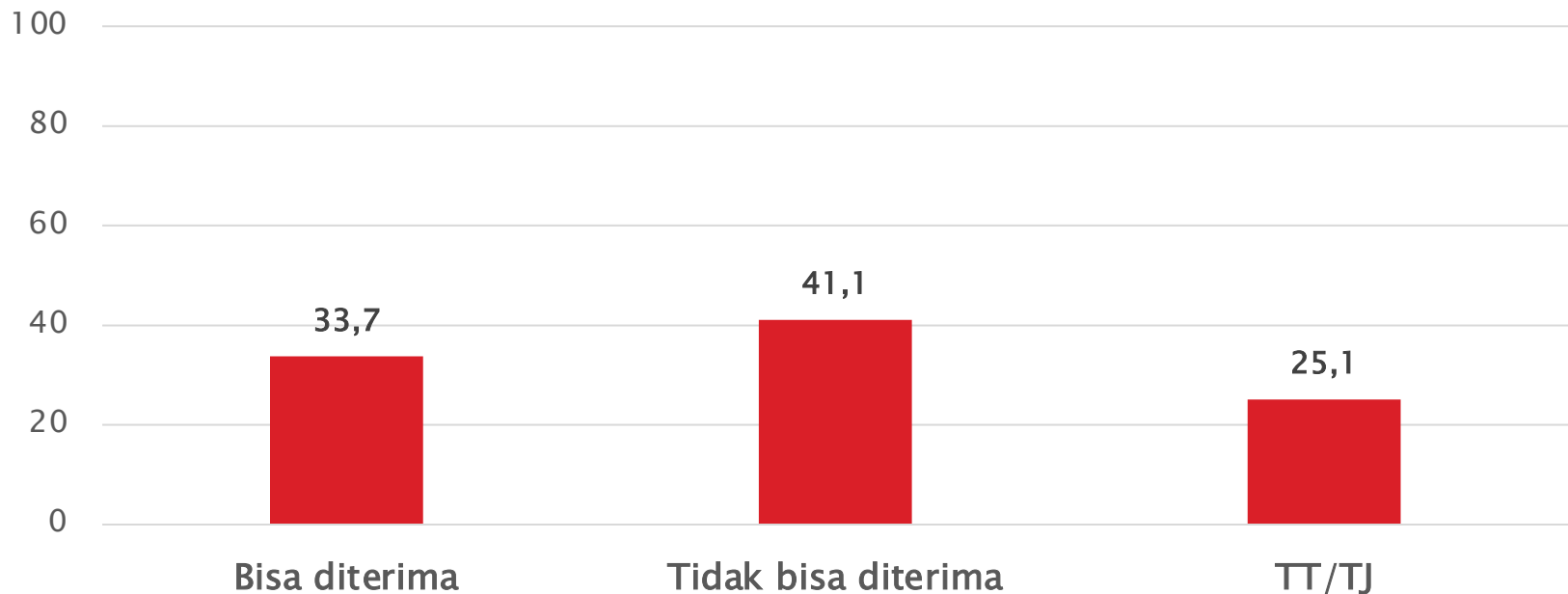
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu). Tapi mereka tidak punya hak untuk menetapkan anggaran negara (APBN) seperti anggota DPR. Apakah tidak adanya hak anggota DPD ini bisa diterima atau tidak? ... (%)



Ada 37.2% warga yang bisa menerima tidak adanya hak anggota DPD untuk menetapkan anggaran negara (APBN) seperti anggota DPR. Sementara yang tidak bisa menerima hampir sama besar, 36.4%.

Tidak Adanya Hak Anggota DPD Mengawasi Pemerintah Bisa Diterima atau Tidak?

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum (pemilu). Tapi mereka tidak punya hak untuk mengawasi pemerintah seperti anggota DPR. Apakah tidak adanya hak anggota DPD ini bisa diterima atau tidak? ... (%)



Ada 33.7% warga yang bisa menerima tidak adanya hak anggota DPD untuk mengawasi pemerintah seperti anggota DPR. Sementara yang tidak bisa menerima lebih banyak, 41.1%.

Temuan

- ▶ Opini publik terbelah tentang wewenang DPD.
- ▶ Dalam hal tidak adanya wewenang DPD membuat undang-undang seperti anggota DPR, yang bisa menerima 37.7%, yang tidak bisa menerima 36.6%, dan yang tidak menjawab 25.7%.
- ▶ Dalam hal tidak adanya wewenang DPD untuk menetapkan anggaran negara (APBN) seperti anggota DPR, yang bisa menerima 37.2%, yang tidak bisa menerima 36.4%, dan yang tidak menjawab 26.4%.
- ▶ Sementara dalam hal tidak adanya wewenang DPD untuk mengawasi pemerintah seperti anggota DPR, yang bisa menerima 33.7%, yang tidak bisa menerima 41.1%, dan yang tidak menjawab 25.1%.

BREAKDOWN SIKAP TERHADAP SISTEM PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN

Sikap terhadap sistem pemilihan dan masa jabatan presiden menurut pemilih partai

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?			Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Apakah setuju dengan pendapat tersebut?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ	Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/sangat tidak setuju	TT/TJ
MASSA PEMILIH PARTAI										
PDI Perjuangan	25.9	7	89	4	21	65	14	66	29	5
Gerindra	10.9	4	86	10	7	83	10	17	78	5
Golkar	10.7	9	77	13	10	77	13	38	54	8
PKB	9.7	10	86	4	14	78	8	44	51	5
Demokrat	6.6	9	89	3	4	93	4	21	75	4
PKS	4.6	19	78	3	12	86	3	18	78	4
Nasdem	3.7	12	81	8	13	66	22	52	43	4
PPP	2.6	20	71	10	21	71	8	29	71	0
PAN	1.8	4	96	0	10	90	0	53	47	0
Lainnya	3.4	9	89	2	21	62	17	60	34	6
TT/TJ	20.2	7	81	12	7	72	20	26	60	14

Setiap pemilih partai pada umumnya tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun. Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya tidak disetujui terutama oleh massa pemilih Gerindra (78%), PKS (78%), Demokrat (71%), warga yang belum punya pilihan partai (60%), pemilih Golkar (54%), dan PKB (51%); sementara dukungan kepada Jokowi untuk maju ketigakalinya datang terutama dari massa pemilih PDIP (66%), kemudian massa pemilih partai nonparlemen (60%), PAN (53%), dan NasDem (52%).

Sikap terhadap sistem pemilihan dan masa jabatan presiden menurut pemilih capres 2019 dan kepuasan atas kinerja Jokowi

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?			Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Apakah setuju dengan pendapat tersebut?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ	Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/sangat tidak setuju	TT/TJ
MASSA PEMILIH CALON PRESIDEN 2019										
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.5	7	85	8	15	70	14	55	38	7
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	44.5	11	82	8	8	82	9	9	86	5
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN JOKOWI										
Sangat/cukup puas	75.7	8	86	6	14	72	13	50	43	7
Kurang/tidak puas	23.4	12	79	9	8	83	10	9	86	5
TT/TJ	0.9	0	59	41	0	39	61	0	41	59

- Massa pemilih Jokowi maupun Prabowo dan warga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.
- Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya tidak disetujui terutama oleh massa pemilih Prabowo (86%), dan warga yang belum kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi (80%). Di kelompok pemilih Jokowi sendiri, yang mendukung Jokowi maju ketigakalinya hanya 55%, dan ada 38% yang tidak setuju.

Sikap terhadap sistem pemilihan dan masa jabatan presiden menurut demografi

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?			Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Apakah setuju dengan pendapat tersebut?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ	Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/sangat tidak setuju	TT/TJ
GENDER										
Laki-laki	50.0	9	86	5	12	78	10	37	56	7
Perempuan	50.0	8	82	10	14	71	15	44	50	6
DESA-KOTA										
Pedesaan	50.3	8	83	9	11	73	17	41	49	10
Perkotaan	49.7	9	86	6	15	76	9	40	57	4
UMUR										
<=25 tahun	22.6	7	88	4	11	78	11	44	49	7
26-40 tahun	36.4	5	86	9	13	73	14	36	56	8
41-55 tahun	24.8	11	83	6	12	76	11	39	56	6
>55 tahun	16.2	14	77	10	16	69	15	47	48	5

- Mayoritas warga di setiap segmen gender, desa-kota, dan umur tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.
- Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya tidak disetujui terutama oleh warga laki-laki (56%), di perkotaan (57%) dan warga usia 26-55 tahun (56%). Tidak ada satupun segmen yang mayoritas mutlak mendukung pencalonan Jokowi untuk ketigakalinya

Sikap terhadap sistem pemilihan dan masa jabatan presiden menurut demografi

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?			Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Apakah setuju dengan pendapat tersebut?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ	Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/sangat tidak setuju	TT/TJ
PENDIDIKAN										
<= SD	30.7	11	74	15	14	68	18	45	45	10
SLTP	21.5	6	87	7	14	73	12	45	49	6
SLTA	36.2	8	90	2	11	79	11	40	55	6
PT	11.6	8	89	3	15	79	6	20	75	5
PENDAPATAN										
< 1 juta	26.1	7	84	9	13	69	18	48	43	8
1 - < 2 juta	34.0	10	80	11	10	74	16	44	50	6
=> 2 juta	40.0	8	89	3	15	78	7	31	62	7
AGAMA										
Islam	87.2	9	83	8	11	78	11	35	59	6
Lainnya	12.8	5	90	5	23	50	27	76	13	11

- Mayoritas warga di setiap segmen pendidikan, pendapatan, dan agama tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.
- Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya tidak disetujui terutama oleh warga yang berpendidikan tinggi (75%), dan warga Muslim (59%). Yang mendukung pencalonan Jokowi untuk ketigakalinya paling banyak datang dari warga Nonmuslim (76%).

Sikap terhadap sistem pemilihan dan masa jabatan presiden menurut wilayah

	Base	Belakangan muncul pendapat agar Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR. Seberapa setuju dengan pendapat tersebut?			Menurut UUD'45 yang berlaku sekarang masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 kali, masing-masing selama 5 tahun. Apakah ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan?			Ada yang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Apakah setuju dengan pendapat tersebut?		
		Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/ sangat tidak setuju	TT/TJ	Harus diubah	Harus dipertahankan	TT/TJ	Setuju/ sangat setuju	Tidak setuju/sangat tidak setuju	TT/TJ
WILAYAH										
SUMATERA	21.0	10	82	8	11	75	14	35	59	6
DKI+BANTEN	8.3	8	85	7	11	81	7	26	64	10
JABAR	16.0	11	79	10	11	78	11	29	66	5
JATENG+DIY	16.6	6	93	2	19	76	6	43	53	4
JATIM	15.1	9	91	0	16	80	4	56	41	3
LAINNYA	23.0	7	79	14	10	65	26	45	41	14

- Mayoritas warga di setiap wilayah tidak setuju presiden dipilih MPR, dan pada umumnya ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun.
- Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya tidak disetujui terutama oleh warga di Jawa Barat (66%), selanjutnya DKI+Banten (64%), Sumatera (59%) dan Jateng+DIY (53%). Yang mendukung pencalonan Jokowi untuk ketigakalinya paling banyak datang dari warga Jawa Timur (56%).

Temuan

- ▶ Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, setiap massa pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi sebagai presiden, dan seluruh segmen demografi dan wilayah pada umumnya tidak setuju presiden dipilih MPR.
- ▶ Mayoritas warga di setiap segmen tersebut juga ingin agar ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun dipertahankan.

Temuan

- ▶ Pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalanya umumnya ditolak oleh kebanyakan kelompok massa pemilih partai.
- ▶ Yang menolak terutama massa pemilih Gerindra (78%), PKS (78%), Demokrat (71%), warga yang belum punya pilihan partai (60%), pemilih Golkar (54%), dan PKB (51%).
- ▶ Sementara yang mendukung Jokowi maju untuk ketigakalanya datang terutama dari massa pemilih PDIP (66%), kemudian massa pemilih partai nonparlemen (60%).

Temuan

- ▶ Dari sisi pemilih capres, pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya ditolak terutama oleh massa pemilih Prabowo (86%), dan warga yang kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi (80%).
- ▶ Di kelompok pemilih Jokowi sendiri cukup banyak yang menolak Jokowi maju lagi (38%). Yang mendukung 55% dan yang tidak menjawab 7%.

Temuan

- ▶ Dari sisi demografi, pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya ditolak terutama oleh warga yang berpendidikan tinggi (75%) dan warga Muslim (59%). Yang mendukung paling banyak datang dari warga Nonmuslim (76%).
- ▶ Dari sisi wilayah, pendapat bahwa Jokowi harus maju untuk ketigakalinya ditolak terutama oleh warga di Jawa Barat (66%), selanjutnya DKI+Banten (64%), Sumatera (59%) dan Jateng+DIY (53%). Yang mendukung paling banyak pada warga di Jawa Timur (56%).

Breakdown Pendapat tentang Presiden Bekerja Menurut GBHN vs Menurut janji pada Rakyat di Masa Kampanye

Presiden bekerja sesuai GBHN vs sesuai janji pada rakyat di masa kampanye menurut pemilih partai

		Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
MASSA PEMILIH PARTAI				
PDI Perjuangan	25.9	23	71	6
Gerindra	10.9	15	73	12
Golkar	10.7	21	68	12
PKB	9.7	16	84	1
Demokrat	6.6	21	79	0
PKS	4.6	27	69	4
Nasdem	3.7	15	74	12
PPP	2.6	28	66	6
PAN	1.8	23	77	0
Lainnya	3.4	14	86	0
TT/TJ	20.2	12	78	10

Setiap masa pemilih partai umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Presiden bekerja sesuai GBHN vs sesuai janji pada rakyat di masa kampanye pemilu capres 2019 dan kepuasan atas kinerja Jokowi

		Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
MASSA PEMILIH CALON PRESIDEN 2019				
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.5	17	76	7
Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	44.5	18	76	6
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN JOKOWI				
Sangat/cukup puas	75.7	19	75	6
Kurang/tidak puas	23.4	16	73	10
TT/TJ	0.9	5	67	28

Pemilih Jokowi maupun Prabowo dan warga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi pada umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Presiden bekerja sesuai GBHN vs sesuai janji pada rakyat di masa kampanye menurut demografi

		Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	50.0	21	72	7
Perempuan	50.0	16	77	7
DESA-KOTA				
Pedesaan	50.3	17	74	10
Perkotaan	49.7	20	76	4
UMUR				
<=25 tahun	22.6	22	76	2
26-40 tahun	36.4	14	75	11
41-55 tahun	24.8	24	73	4
>55 tahun	16.2	16	76	8

Warga di setiap segmen gender, desa-kota, dan umur pada umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Presiden bekerja sesuai GBHN vs sesuai janji pada rakyat di masa kampanye menurut demografi

		Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	30.7	13	75	11
SLTP	21.5	14	81	4
SLTA	36.2	20	74	6
PT	11.6	33	64	3
PENDAPATAN				
< 1 juta	26.1	16	77	8
1 - < 2 juta	34.0	18	73	9
=> 2 juta	40.0	20	75	4
AGAMA				
Islam	87.2	18	76	6
Lainnya	12.8	23	64	13

Warga di setiap segmen pendidikan, pendapatan, dan agama pada umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Presiden bekerja sesuai GBHN vs sesuai janji pada rakyat di masa kampanye menurut wilayah

		Terhadap dua pendapat berikut, Ibu/Bapak lebih setuju yang mana?		
		Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR	Presiden bekerja sesuai janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat	TT/TJ
WILAYAH				
SUMATERA	21.0	17	72	10
DKI+BANTEN	8.3	13	83	4
JABAR	16.0	20	75	5
JATENG+DIY	16.6	22	75	3
JATIM	15.1	13	86	0
LAINNYA	23.0	20	66	14

Warga di setiap wilayah pada umumnya tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program pada masa kampanye.

Temuan

- ▶ Mayoritas warga di setiap kelompok pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun yang tidak puas dengan kinerja presiden Jokowi, dan di setiap lapisan demografi dan wilayah tidak menghendaki presiden bekerja atas dasar GBHN, melainkan atas dasar janji program presiden pada masa kampanye.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- ▶ Trend menunjukkan opini publik yang semakin positif tentang arah negara. Dalam survei terakhir Mei 2021 warga yang menilai negara kita bergerak ke arah yang benar sebanyak 80%. Ini indikasi tidak ada masalah dasar yang dirasakan warga umumnya.
- ▶ Namun demikian muncul aspirasi di elite untuk melakukan perubahan pada dasar negara sekarang.
- ▶ Keinginan elite itu di tengah–tengah sikap warga yang hampir semuanya (83.4%) tidak menghendaki perubahan Pancasila dan UUD 1945.
- ▶ Secara lebih khusus muncul pemikiran–pemikiran yang merongrong sistem presidensialisme yang sedang kita anut sekarang: ada keinginan agar presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat melainkan oleh MPR; presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR, bukan janji calon presiden kepada rakyat saat kamapnye. Tapi apa kata rakyat?

Kesimpulan

- ▶ Mayoritas rakyat, 84.3%, menolak jika Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi oleh MPR.
- ▶ Hanya 8.4% warga yang mendukung jika Presiden dipilih oleh MPR.
- ▶ Gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung tapi dipilih oleh MPR ditolak oleh mayoritas warga di setiap pendukung partai maupun berbagai lapisan masyarakat.

Kesimpulan

- ▶ Mayoritas warga, 74.7%, lebih setuju “Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat”.
- ▶ Hanya 18.4% yang setuju pendapat “Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR”.

Kesimpulan

- ▶ Penolakan atas ide presiden bekerja atas dasar GBHN dan bertanggung jawab pada MPR merata di setiap kelompok masyarakat.
- ▶ Mayoritas dari setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, serta mayoritas warga pada setiap segmen demografi dan wilayah lebih menginginkan presiden bekerja atas dasar janji programnya pada masa kampanye dan bertanggung jawab pada rakyat.

Kesimpulan

- ▶ Rakyat umumnya (74%) menghendaki agar masa jabatan presiden 2 kali dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%.
- ▶ Keinginan mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun ini mayoritas di setiap pemilih partai, pemilih capres, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan juga mayoritas di setiap segmen demografi dan wilayah.
- ▶ Maka gagasan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden yang berlaku sekarang (maksimal 2 kali dan masing-masing 5 tahun) tidak mendapat dukungan dari rakyat pada umumnya.

Kesimpulan

- ▶ Namun demikian penolakan pada masa jabatan presiden lebih dari 2 kali menurun ketika nama Jokowi disebutkan. Ada efek Jokowi.
- ▶ Tapi umumnya publik (52.9%) tetap tidak setuju presiden Jokowi kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya. Yang setuju lebih sedikit, 40.2%, dan yang tidak menjawab 6.9%.
- ▶ Penolakan atas pencalonan Jokowi untuk ketigakalinya terutama datang dari massa pemilih Prabowo (86%), dan oleh warga yang kurang/tidak puas dengan kinerja Jokowi (80%).

Kesimpulan

- ▶ Namun demikian, di kelompok pemilih Jokowi sendiri cukup banyak yang menolak jika Jokowi maju lagi (38%). Yang mendukung 55% dan yang tidak menjawab 7%.

Kesimpulan

- ▶ Penolakan atas gagasan pencalonan kembali Jokowi sebagai capres berasal dari lintas pemilih partai, terutama dari massa pemilih Gerindra (78%), PKS (78%), Demokrat (71%), yang belum punya pilihan partai (60%), pemilih Golkar (54%), dan pemilih PKB (51%).
- ▶ Sementara yang mendukung Jokowi maju lagi datang terutama dari massa pemilih PDIP (66%), kemudian massa pemilih partai nonparlemen (60%).

Kesimpulan

- ▶ Dari sisi demografi, ide pencalonan kembali Jokowi untuk ketigakalinya ditolak terutama oleh warga yang berpendidikan tinggi (75%), juga oleh warga Muslim (59%). Sementara yang mendukung paling banyak pada warga Nonmuslim (76%).
- ▶ Dari sisi wilayah, penolakan atas pencalonan kembali Jokowi terutama pada warga Jawa Barat (66%), selanjutnya DKI+Banten (64%), Sumatera (59%) dan Jateng+DIY (53%). Sementara yang mayoritas mendukung adalah warga Jawa Timur (56%).

Kesimpulan

- ▶ Opini publik juga terbelah tentang wewenang DPD.
- ▶ Dalam hal tidak adanya hak anggota DPD membuat undang-undang seperti anggota DPR, yang bisa menerima 37.7%, yang tidak bisa menerima 36.6%, dan yang tidak menjawab 25.7%.
- ▶ Dalam hal tidak adanya hak anggota DPD untuk menetapkan anggaran negara (APBN) seperti anggota DPR, yang bisa menerima 37.2%, yang tidak bisa menerima 36.4%, dan yang tidak menjawab 26.4%.
- ▶ Sementara dalam hal tidak adanya hak anggota DPD untuk mengawasi pemerintah seperti anggota DPR, yang bisa menerima 33.7%, yang tidak bisa menerima 41.1%, dan yang tidak menjawab 25.1%.

Kesimpulan

- ▶ Di tengah sentimen rakyat yang secara umum positif terhadap arah bangsa, di mata publik tidak ada urgensi untuk mengamandemen kembali konstitusi kita terkait dengan hakekat presiden dan masa jabatan presiden.
- ▶ Namun demikian perdebatan yang lebih urgen mungkin berkaitan dengan amandemen terkait penguatan wewenang DPD yang punya legitimasi demokrasi kuat seperti halnya DPR.
- ▶ Publik sendiri masih terbelah dalam soal amandemen bagi penguatan wewenang DPD ini.

Terima Kasih